

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, *Civil Society Organization (CSO)* atau biasa dikenal juga dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dianggap sebagai organisasi yang baik sebagai pengawal pembangunan terutama jika dikaitkan dengan pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan adalah bentuk pembangunan sosial yang menjadi gerakan masyarakat yang didukung oleh semua unsur, yaitu pemerintah, anggota legislatif, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi sosial, masyarakat dan juga media massa.¹ LSM atau dalam istilah lain dikenal dengan *Civil Society Organization (CSO)* secara sadar telah memiliki peran ketika pemerintah belum dapat melakukan pembangunan pada daerah-daerah yang dianggap miskin. Hal ini juga dijelaskan dalam buku yang berjudul *Engendering Governance Institution: State, Market and Civil Society* karya Smita Mishra Panda, mengatakan bahwa *in case of collaboration, NGOs work with the government with a mission to change government practice/policies without overt conflict.*² (Jika berkolaborasi, LSM bekerja sama dengan pemerintah yang memiliki misi untuk mengubah praktik/kebijakan pemerintah tanpa konflik terbuka).

¹ Oos M. Anwas, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 50.

² Smita Mishra Panda, 2008, *Engendering Governance Institution: State, Market and Civil Society*, (New Delhi: SAGE Publication India Pvt Ltd), hlm. 87

Beberapa isu yang kerap kali menjadi perhatian di berbagai negara di dunia diantaranya masalah kemiskinan, kelaparan, kesehatan, dan pengangguran. Apabila diperhatikan, masing-masing isu saling berkaitan satu dengan yang lain. Sebagai contoh seorang individu tidak akan mampu bekerja dengan baik apabila kondisi kesehatannya buruk. Dan kondisi kesehatan seseorang bergantung pada gizi, nutrisi yang mereka dapatkan sejak kecil hingga dewasa.

Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang kompleks tersebut sendiri, dalam hal inilah diperlukan peranan NGO dalam membantu meringankan beban/tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya. Berikut beberapa isu kemiskinan yang sering muncul di negara berkembang yaitu masalah buruh anak (*child-labor traps*), tingkat buta huruf (*illiteracy traps*), tingkat kemampuan *skill* rendah (*low-skill traps*), modal kerja yang sedikit (*working-capital traps*), lilitan hutang (*debt-bondage traps*), aset yang tidak diasuransikan (*uninsured-risk traps*), keterbatasan memperoleh informasi (*information traps*), kekurangan gizi dan berpenyakit (*undernutrition and illness traps*), tingkat kelahiran tinggi (*high-fertility traps*), pemenuhan kebutuhan dasar; sandang, pangan, papan (*subsistence traps*), erosi pertanian (*farm-erosion traps*), kesalahan mengelola sumber daya milik umum (*common-property mismanagement traps*), dan ketidakberdayaan sosial dan politik (*powerlessness traps*).³

³ Jennifer M. Brinkerhoff, Stephen C. Smith, dan Hildy Teegen, 2007, *NGOs and the Millennium Development Goals: Citizen Action to Reduce Poverty*, (New York: PALGRAVE MACMILLAN), hlm. 124-130

Beberapa peran NGO dalam menangani masalah kemiskinan adalah:⁴

- a. Menciptakan inovasi: inovasi yang dimaksud adalah peran NGO dalam menciptakan program yang memang menjadi kebutuhan utama dari masyarakat miskin. Dalam hal ini, sebuah NGO berperan untuk menciptakan inovasi yang akan diwujudkan dalam bentuk rancangan, program, dan implementasi kegiatan. Sebagai contoh NGO menjadi pionir program pendidikan dasar non-formal (*non-formal primary education*), mengadakan kampanye melalui komunitas pendukung melek huruf, kegiatan menonton bersama di desa dengan tujuan memupuk rasa solidaritas dan kebersamaan, dan kegiatan pelatihan komputer untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat miskin.
- b. Fleksibilitas program: sebagai organisasi yang independen, kegiatan yang dilakukan NGO tidak terpengaruh oleh intervensi program pemerintah baik yang berskala lokal dan nasional. Selain itu, kegiatan NGO tidak terlalu dipengaruhi oleh tuntutan kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah daerah, dengan arti NGO memiliki kebebasan menentukan visi misi yang menjadi target kerja mereka.
- c. Memiliki spesialisasi pengetahuan teknis: NGO biasanya memiliki tenaga ahli yang terspesialisasi pada bidang tertentu. Keahlian mereka kadang melebihi pegawai pemerintah. Pengetahuan yang mereka miliki sangat membantu menyelesaikan masalah riil masyarakat. Keahlian khusus (spesialisasi)

⁴ *Ibid.*, hlm. 132-138

bermanfaat untuk menciptakan program yang unik dan memang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, sebagai contoh NGO *The Grameen Phone Lady* di Bangladesh.

- d. Memiliki target kebutuhan publik lokal: dalam hal ini NGO berperan dalam menyediakan akses berupa fasilitas kesehatan, pendidikan non-formal, kerjasama untuk memperbaiki infrastruktur desa, hingga penyediaan akses teknologi informasi.
- e. Rancangan pengaturan kepemilikan sumberdaya bersama: dalam hal ini NGO berperan menyadarkan masyarakat akan kepemilikan sumber-sumber alam seperti makanan dan perlindungan, sebagai hak yang pantas didapatkan. NGO dalam kegiatan ini dapat melaksanakan pelatihan, mengadakan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah lainnya demi tercapainya kebaikan bersama.
- f. Kredibilitas dan kepercayaan: dalam hal ini NGO dipercaya untuk mengemban tugas mengentaskan kemiskinan karena NGO dianggap memiliki kemandirian untuk membentuk struktur pengelola organisasi yang didasarkan pada prinsip profesionalitas, kompetensi, keadilan, reliabilitas, transparan, dan konsistensi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat miskin.
- g. Perwakilan dan advokasi: dalam hal ini NGO dipercaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil yang tidak memperoleh keadilan di tengah-tengah kehidupan berdemokrasi sebuah negara.

Sejalan dengan peranan NGO dalam mengentaskan kemiskinan, di Indonesia sendiri kemiskinan bukanlah merupakan masalah yang baru ada. Kemiskinan

merupakan permasalahan yang mendasar dalam pembangunan ekonomi, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia.⁵ Data Susenas pada tahun 2009 menggambarkan bahwa terdapat 40% dari penduduk Indonesia termasuk kelompok miskin dan rentan miskin.⁶ Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan sebesar 14,15% dan jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 32,53 juta individu.⁷ Ditambah lagi menurut data Susenas koefisien gini yang angkanya masih jauh dari 0 yaitu sebesar 0,41 pada tahun 2014 menunjukkan kemiskinan semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan ini sudah ada sejak lama, sehingga dibutuhkan program pembangunan untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Pernyataan Senator Moynihan memunculkan pertanyaan tentang penyebab kemiskinan. Dikatakan bahwa cara yang paling pasti untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan⁸ (1) *finish school* (menyelesaikan sekolah); (2) *not get pregnant outside marriage* (tidak hamil di luar nikah); (3) *get a job, any job, and stick with it* (mencari pekerjaan apa saja dan bertahan pada pekerjaan tersebut). Tapi, dari beberapa cara tersebut yang terpenting adalah memiliki pekerjaan tetap terlebih dahulu. Di negara maju dalam kondisi ekonomi yang buruk dan tingkat pengangguran yang tinggi, menyebabkan negara berusaha untuk menciptakan lapangan kerja semaksimal

⁵ Nur Firdaus, Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 22, No. 1, 2004, hlm. 55

⁶ Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, www.tnp2k.go.id/id/kebijakanpercepatan/perkembangan-tingkat-kemiskinan/ diakses pada 09 Februari 2018 pukul 21.13 WIB

⁷ www.tnp2k.go.id/id/kebijakan-percepatan/perkembangan-tingkat-kemiskinan/ diakses pada 09 Februari 2018 pukul 21:13 WIB

⁸ Michael Tanner, 1996, *The End of Welfare: Fighting Poverty in the Civil Society*, (Washington, D.C. : Cato Institute), hlm. 17

mungkin. NGO bernama Yayasan Rockefeller meneliti masyarakat miskin di Boston antara tahun 1980 dan 1988 dan mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil menyebabkan tingkat pengangguran menurun 4%.⁹ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa menurunkan angka kemiskinan.

Penanganan masyarakat miskin sendiri tercantum pada UU No. 13 tahun 2011 yang mendefinisikan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kebijakan, pemerintah telah mendukung upaya dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga ditunjukkan dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang menempati peringkat ke 110 dari 187 negara dengan nilai 0,684 pada tahun 2015.¹¹

Dibalik laju pembangunan kota-kota besar yang begitu pesat, tersembunyi sejumlah keadaan nyata yang cukup memprihatinkan. Hal tersebut ditunjukkan melalui data BPS yang memperlihatkan kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 8,16%, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,86

⁹ *Ibid.*, hlm. 24

¹⁰ UU No. 13 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 1, Dit. Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia.

¹¹ Fathiya Wardah, UNDIP: Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Alami Kemajuan, www.voaindonesia.com diakses pada tanggal 29 Mei 2017 diakses pada 10 Februari 2018 pukul 13.19

juta orang sehingga total penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang.¹² Selain itu, kemiskinan juga terdapat pada perkotaan dan pedesaan lainnya di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dari data BPS yang menampilkan bahwa pada tahun 2017 yang terbagi ke dalam 2 periode yaitu periode Maret dan Desember. Berikut adalah tabel yang menggambarkan kemiskinan berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia dan terbagi atas wilayah pedesaan dan perkotaan.

Tabel I.1
Data Jumlah Kemiskinan Berdasarkan Provinsi

Provinsi	TAHUN 2017			
	Semester 1 (Maret) Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan)		Semester 2 (September) Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan)	
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan
ACEH	458.011	425.730	479.872	442.869
SUMATERA UTARA	425.693	396.033	438.894	407.157
SUMATERA BARAT	472.614	439.220	475.365	441.415
RIAU	463.248	450.581	474.626	457.368
JAMBI	457.818	360.519	465.233	366.036
SUMATERA SELATAN	410.532	347.520	417.828	356.020
BENGKULU	477.801	438.342	490.475	449.857
LAMPUNG	420.227	371.894	427.072	377.049
KEP. BANGKA BELITUNG	571.229	602.942	595.031	623.111
KEP. RIAU	516.418	492.642	540.062	507.795
DKI JAKARTA	536.546	-	578.247	-
JAWA BARAT	345.151	341.682	354.866	353.103
JAWA TENGAH	334.522	331.673	339.692	337.657
DI YOGYAKARTA	385.308	348.061	413.631	352.861
JAWA TIMUR	344.164	339.537	372.585	347.997
BANTEN	396.608	363.588	421.137	373.039
BALI	370.615	345.342	371.118	350.826
NUSA TENGGARA BARAT	355.250	337.333	363.697	343.387

¹² Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Provinsi, <https://www.bps.go.id/data/kemiskinan/tahun/2014-2015> diakses pada 10 Februari 2018 pukul 13:32 WIB

Provinsi	TAHUN 2017			
	Semester 1 (Maret) Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan)		Semester 2 (September) Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan)	
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan
NUSA TENGGARA TIMUR	406.973	326.320	409.382	329.136
KALIMANTAN BARAT	379.187	375.621	401.588	394.313
KALIMANTAN TENGAH	373.219	414.002	378.311	418.861
KALIMANTAN SELATAN	412.452	393.097	434.791	407.382
KALIMANTAN TIMUR	555.880	532.719	564.801	554.497
KALIMANTAN UTARA	562.937	537.246	595.802	554.548
SULAWESI UTARA	329.330	336.837	331.931	340.146
SULAWESI TENGAH	416.453	383.097	430.728	400.639
SULAWESI SELATAN	296.644	274.434	303.834	287.788
SULAWESI TENGGARA	297.829	279.739	308.624	295.496
GORONTALO	298.492	295.057	312.931	304.353
SULAWESI BARAT	295.178	304.849	318.376	315.137
MALUKU	437.644	435.787	461.552	443.565
MALUKU UTARA	410.412	383.784	413.797	390.914
PAPUA BARAT	515.849	488.564	523.381	499.086
PAPUA	498.368	441.287	508.403	446.994

Sumber: Data BPS (2017)

Selain kemiskinan, masalah pengangguran merupakan masalah lain yang juga cukup serius yang kini melanda perekonomian Indonesia, tidak hanya di desa tetapi juga di kota. Hal itu tidak hanya terlihat dari tingkat kemiskinan di desa, tapi sangat terbatasnya peluang kerja yang tersedia pada sektor industri di kota, telah menyebabkan masalah pengangguran ini semakin sulit dicarikan jalan penyelesaiannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun pada Februari 2017¹³ sebesar 5,33 persen dibanding pada periode yang sama tahun lalu, yang sebesar 5,50 persen. Angka TPT tersebut juga lebih rendah dibanding Agustus 2016, yakni 5,61 persen. Data ini diperkuat oleh hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis oleh BPS di *website* resmi Badan Pusat Statistik pada tanggal 15 Desember 2017. Berikut adalah tabel yang menunjukkan angka TPT yang terbagi menjadi dua periode dalam waktu dua tahun berturut-turut.

Tabel I.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi Tahun 2016-2017

Provinsi	TAHUN			
	2016		2017	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
ACEH	8,13	7,57	7,39	6,57
SUMATERA UTARA	6,49	5,84	6,41	5,60
SUMATERA BARAT	5,81	5,09	5,80	5,58
RIAU	5,94	7,43	5,76	6,22
JAMBI	4,66	4,00	3,67	3,87
SUMATERA SELATAN	3,94	4,31	3,80	4,39
BENGKULU	3,84	3,30	2,81	3,74
LAMPUNG	4,54	4,62	4,43	4,33
KEP. BANGKA BELITUNG	6,17	2,60	4,46	3,78
KEP. RIAU	9,03	7,69	6,44	7,16
DKI JAKARTA	5,77	6,12	5,36	7,14
JAWA BARAT	8,57	8,89	8,49	8,22
JAWA TENGAH	4,20	4,63	4,15	4,57
DI YOGYAKARTA	2,81	2,72	2,84	3,02
JAWA TIMUR	4,14	4,21	4,10	4,00
BANTEN	7,95	8,92	7,75	9,28
BALI	2,12	1,89	1,28	1,48
NUSA TENGGARA BARAT	3,66	3,94	3,86	3,32

¹³ Tempo.co, BPS: *Angka Pengangguran Menurun pada Februari 2017*, <https://bisnis.tempo.co/read/872601/bps-angka-pengangguran-menurun-pada-februari-2017> diakses pada 10 Februari 2018 pukul 14:39 WIB

Provinsi	TAHUN			
	2016		2017	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
NUSA TENGGARA TIMUR	3,59	3,25	3,21	3,27
KALIMANTAN BARAT	4,58	4,23	4,22	4,36
KALIMANTAN TENGAH	3,67	4,82	3,13	4,23
KALIMANTAN SELATAN	3,63	5,45	3,53	4,77
KALIMANTAN TIMUR	8,86	7,95	8,55	6,91
KALIMANTAN UTARA	3,92	5,23	5,17	5,54
SULAWESI UTARA	7,82	6,18	6,12	7,18
SULAWESI TENGAH	3,46	3,29	2,97	3,81
SULAWESI SELATAN	5,11	4,80	4,77	5,61
SULAWESI TENGGARA	3,78	2,72	3,14	3,30
GORONTALO	3,88	2,76	3,65	4,28
SULAWESI BARAT	2,72	3,33	2,98	3,21
MALUKU	6,98	7,05	7,77	9,29
MALUKU UTARA	3,43	4,01	4,82	5,33
PAPUA BARAT	5,73	7,46	7,52	6,49
PAPUA	2,97	3,35	3,96	3,62
INDONESIA	5,50	5,61	5,33	5,50

Sumber: Data BPS (2017)

Meskipun terlihat jumlah penurunan pada angka tingkat pengangguran di Indonesia, pemerintah tetap memiliki ‘Pekerjaan Rumah’ yang cukup besar. Dari segi jumlah, terdapat sebanyak 128,06 juta penduduk angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2017 sehingga jumlah pengangguran pada periode tersebut mencapai 7,04 juta orang. Dilansir dalam laman elshinta.com¹⁴, Kepala BPS, Suhariyanto mengemukakan bahwa ada perbedaan TPT antara di kota dan di desa. Tingkat pengangguran kota lebih tinggi daripada tingkat pengangguran di desa. Pada Agustus 2017, TPT di perkotaan sebesar 6,79 persen sedangkan TPT di pedesaan sebesar 4,01 persen. Dibanding

¹⁴ Elshinta.com, *Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2017, 5,50 Persen*, <https://elshinta.com/news/126243/2017/11/06/tingkat-pengangguran-terbuka-agustus-2017-550-persen> diakses pada 10 Februari 2018 pukul 15:03 WIB

setahun yang lalu, TPT wilayah pedesaan menurun 0,50 persen, sementara peningkatan terjadi di perkotaan sebesar 0,90 persen.

Melihat kenyataan bahwa kondisi perkotaan yang lebih rentan dengan isu kemiskinan dan pengangguran, ada satu hal yang semestinya tidak dilupakan bahwa masyarakat miskin kota sebagai sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk berpikir dan bertindak pada saat ini memerlukan “penguatan” agar mampu memanfaatkan daya yang dimiliki. Hal tersebut sesuai dengan konsep pemberdayaan yang menjadikan masyarakat yang belum berdaya menjadi berdaya. Menurut Mujiyadi B. dan Gunawan, pemberdayaan merupakan suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat miskin.¹⁵ Konsep ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin dan menganggur memiliki beberapa potensi untuk memutus rantai kemiskinan yang salah satunya adalah melalui pendidikan untuk masyarakat miskin.

Program pemberdayaan masyarakat NGO sebagai solusi yang ditawarkan dari dan untuk masyarakat itu sendiri tentu dilakukan dengan cara memberikan ‘pancing’ bukan ‘ikan’ kepada masyarakat. Artinya program yang mereka buat harus diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat untuk mau bekerja keras, belajar dan berjuang untuk sukses.

¹⁵ Tukiran, Agus Joko Apriyanto Pitoyo dan Pande Made Kutaneegara, 2010, *Akses Penduduk Miskin Terhadap Kebutuhan Dasar*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada), hlm. 87

Konsep pemberdayaan tersebut dilakukan oleh salah satu lembaga non-pemerintah bernama Institut Kemandirian (IK) yang diusung langsung oleh Yayasan Dompot Dhuafa dan bertempat di Tangerang, tepatnya di Komplek Villa Ilhami atau lebih dikenal dengan sebutan Islamic Village. Sebagai salah satu jejaring Dompot Dhuafa, Institut Kemandirian menjadi salah satu program Dompot Dhuafa yang *concern* bergerak dalam bidang pendidikan.

Penelitian ini akan difokuskan untuk melihat praktik pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh Institut Kemandirian kepada peserta pelatihan yang tentu saja berasal dari masyarakat miskin dan telah berhasil lolos seleksi dalam bentuk kursus gratis. Adanya berbagai program kursus gratis ini merupakan langkah dalam mobilitas masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik. Dengan begitu, Institut Kemandirian telah melakukan pemberdayaan sosial masyarakat miskin di perkotaan melalui bentuk pelatihan-pelatihan yang dikemas dengan nuansa pembelajaran aplikatif berbasis keterampilan kerja secara gratis.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana praktik sosial lembaga non-pemerintahan Institut Kemandirian yang diusung oleh Yayasan Dompot Dhuafa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis keterampilan kerja. Selain itu, penulis mencoba melihat bagaimana dan apa saja yang menjadi tantangan hambatan bagi Institut Kemandirian dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Dalam hal ini, maka penelitian akan terpusat pada salah satu lembaga non-pemerintah yang diusung oleh Yayasan Dompot Dhuafa bernama Institut Kemandirian.

Selama ini, kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran masih mengandalkan kucuran dana dan mengenyampingkan upaya pemberdayaan masyarakatnya. Sebab, setiap permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya ekonomi semata. Padahal, kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran juga harus dilihat dari segi non-ekonomis, misalnya upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang sifatnya “*bottom-up intervention*”, yang menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya, padat karya dan kemandirian lewat pendidikan keterampilan dan pengembangan usaha kecil dan kecil-bawah untuk menumbuhkan sikap mental wirausaha.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka penulis mendapatkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemberdayaan berbasis keterampilan kerja yang dilakukan oleh Institut Kemandirian?
2. Bagaimana strategi pemberdayaan sosial berbasis keterampilan kerja yang dilakukan oleh Institut Kemandirian?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendorong bagi Institut Kemandirian dalam proses pemberdayaan berbasis keterampilan kerja?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk pemberdayaan berbasis keterampilan kerja yang dilakukan oleh Institut Kemandirian.
2. Mengetahui lebih jauh bagaimana strategi pemberdayaan sosial berbasis keterampilan kerja yang dilakukan oleh Institut Kemandirian.
3. Mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bagi Institut Kemandirian dalam proses pemberdayaan berbasis keterampilan kerja.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pihak-pihak terkait baik praktisi pemberdayaan sosial maupun masyarakat secara luas agar dapat memahami konsep pemberdayaan sosial dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja. Dan diharapkan pula dapat memberikan manfaat dan kontribusi ilmiah di bidang Sosiologi Pendidikan.

1.4 Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian sejenis mengenai bagaimana pentingnya peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan diulas di dalam Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Volume 6 No.1, oleh Dicky Djatnika Utama dengan judul *Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan*. Dalam penelitian ini, dijelaskan tentang bagaimana kaitan antara pendidikan dan penuntasan kemiskinan berdasarkan pemikiran para ahli ekonomi seperti Amartya Sen dan Jeffrey Sachs.

Menurut Amartya Sen, kemiskinan masih terus berlarut di banyak negara berkembang terutama di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kemerdekaan yang dibatasi. Kemerdekaan individu yang terpasung karena sistem politik menyebabkan rakyat banyak tidak dapat menyuarakan penderitaannya. Pemasangan kapasitas untuk mengembangkan diri ini, menurut Sen, merupakan pemasangan terhadap kemampuan manusia (*human capability*) sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan. Sementara menurut Jeffrey Sachs di dalam bukunya *The End of Proverty* salah satu mekanisme dalam penuntasan kemiskinan ialah pengembangan *human capital* terutama pendidikan dan kesehatan.¹⁶

Di dalam penelitian ini dijelaskan pula strategi kunci kurangi kemiskinan yakni dengan pemerintah Indonesia yang harus terus berupaya meningkatkan pemertaan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang selama ini tidak bisa sekolah atau *drop out* karena berbagai alasan. Penelitian ini diperkuat dengan data-data statistik yang riil sehingga nampak bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan isu yang harus dituntaskan secara serius.

Kedua, jurnal nasional karya Kironim Baroroh¹⁷. Penelitian yang dilakukan Kironim memfokuskan pada pemberdayaan perempuan dengan menggunakan strategi

¹⁶ Dicky Djatnika Utama, Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*. Vol. 6, No.1, Januari 2009. hlm. 4.

¹⁷ Kironim Baroroh, Peran Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Life Skill (Studi Kasus di Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta), *Dimensia*, Vol.3 No.1, 2015 diakses melalui <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3407> pada tanggal 09 Oktober 2017 pukul 13.00 WIB

advokasi. Strategi advokasi dalam hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan perempuan yang kurang mampu, tertindas dan dianggap tidak bisa mengerjakan sesuatu diluar kegiatan domestik terutama sulitnya akses ekonomi. Berdasarkan hal tersebut maka adanya LSM Lembaga Advokasi Perempuan Yogyakarta atau LAPY mengadakan kegiatan swadaya perempuan dalam bentuk pelatihan *skill* menjahit. Pelatihan menjahit ini dikategorikan sebagai pendidikan non-formal yang berguna untuk menambah keterampilan perempuan di Yogyakarta dan meningkatkan taraf hidup perempuan-perempuan yang kurang mampu.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini dilakukan melalui intervensi pembinaan dari pihak LAPY. Intervensi pembinaan dilakukan karena dapat membantu dalam pemecahan masalah sosial yang terdapat pada anggota kelompok swadaya. Dalam aspek ekonomi, intervensi pembinaan akan mampu mendorong masyarakat kecil untuk melakukan pemupukan modal. Dengan sistem kelompok maka modal kecil yang dikumpulkan oleh warga bisa menjadi modal yang besar untuk pengembangan usaha. Tidak dapat dipungkiri *life skill* adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia untuk bertahan hidup. Dengan memiliki *life skill* tertentu maka individu khususnya perempuan yang sering dianggap rendah akan bisa mengaktualisasikan potensinya dan hidup dengan sejahtera.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan LSM LAPY ini memfokuskan pada keterampilan menjahit sebagai *life skill* yang harus dimiliki perempuan yang kurang mampu di Yogyakarta. Sebagai LSM yang berbasis advokasi pendidikan, penyadaran diri melalui penanaman nilai-nilai untuk

memperjuangkan hak-haknya salah satunya berkiprah dalam bidang ekonomi telah dilakukan melalui pendidikan non-formal keterampilan menjahit ini. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat banyak hambatan baik dari anggota kelompok swadaya dan juga pihak LSM. Masalah permodalan adalah salah satu hambatan yang memberikan pengaruh pada jalannya program pemberdayaan ini. Selain itu, jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi relawan dalam kegiatan pemberdayaan juga masih dirasa kurang.

Ketiga, jurnal internasional karya M. Rezaul Islam dan William J. Morgan¹⁸. Penelitian Rezaul dan William yang terletak di Bangladesh memfokuskan pada intervensi agar masyarakat dapat mengatasi keadaan sosial ekonomi yang memburuk dengan cara pengembangan kapital sosial dan pemberdayaan. Pada saat ini NGO di Bangladesh secara mayoritas bekerja untuk menciptakan peluang, sumber daya manusia dan pemberdayaan secara langsung. Dalam penelitiannya, Rezaul dan William mengambil dua contoh NGO yang melakukan pemberdayaan dan pengembangan kapital sosial yaitu NGO PAB (*Practical Action Bangladesh*) dan Proshika. Meskipun target sasarnya berbeda secara geografis namun pelaksanaan pemberdayaan dan kapital sosial dilakukan pada kedua NGO tersebut untuk menciptakan sosial ekonomi masyarakat miskin Bangladesh.

¹⁸ M. Rezaul Islam dan William J. Morgan, *Non-Governmental Organizations In Bangladesh: Their Contribution to Social Capital Development and Community Empowerment*, *Oxford University Press and Community Development Journal*, Vol. 47 No.3, 2011 diakses melalui [fromresearchgate.net](http://www.researchgate.net) pada tanggal 09 Oktober 2017 pukul 08:02 WIB

Kapital sosial adalah hal “penting” yang muncul dari hubungan antara manusia dan lebih jauh lagi dikembangkan melalui kepercayaan, pengertian dan tindakan satu sama lain berdasarkan nilai dan norma-norma yang berlaku. Sedangkan pemberdayaan itu sendiri sebagai „pendekatan alternatif pembangunan“ yang melibatkan aspek sosial dari pembangunan dan komunitas lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya lokal lingkungannya. Kedua hal tersebut terdapat pada pelaksanaan program kedua NGO, NGO PAB (*Practical Action Bangladesh*) yang memberdayakan masyarakat pedesaan melalui program “*exposure visit*” atau kunjungan terbuka, sehingga masyarakat pedesaan dapat bertemu dengan masyarakat perkotaan dan pengusaha yang ingin menjalin kerja sama. Sedangkan Proshika yang memberdayakan masyarakat perkotaan juga berhasil melalui salah satu programnya yang akhirnya membuat federasi dan mengubah norma-norma dan nilai dengan agensi dan komunitas.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan dan pengembangan kapital merupakan hal yang penting dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Bangladesh. LSM sebagai agen penting perubahan harus melakukan kedua hal penting tersebut untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu aktivitas sosial NGO adalah mobilisasi sosial yang mana sesuai dengan paradigma pembangunan yang ingin mengentaskan kemiskinan. Seperti yang sebelumnya dibahas pada kapital sosial bahwa terdapat beberapa elemen dan hal tersebutlah yang akhirnya juga bisa membentuk usaha/modal sosial. Modal sosial tersebutlah yang sudah terbukti berhasil dalam intervensi komunitas untuk pemberdayaan.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Laksitaning Ratri Widowati.¹⁹ Dalam studi ini, Ratri mencoba untuk mendeskripsikan program pelatihan vokasional bagi penyandang difabilitas yang terdapat di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) Cibinong. Penelitian ini menjelaskan bagaimana program pelatihan vokasional BBRVBD dapat membantu penyandang difabilitas. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan evaluasi terhadap program pelatihan vokasional BBRVBD dilihat dari konsep pengembangan kapasitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah institusi milik pemerintah yang fokus dalam memberikan pelatihan vokasional bagi penyandang difabilitas tubuh, yaitu Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) Cibinong.

Berdasarkan temuan lapangan, terdapat tiga tahapan dalam program pelatihan vokasional, yaitu proses seleksi, proses pelaksanaan program dan proses resos binjut. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengembangan kapasitas, pemberdayaan serta analisis SWOT. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pelatihan vokasional yang disebabkan oleh birokrasi yang berjalan kurang baik. Walaupun terjadi beberapa masalah dalam pelaksanaannya, program pelatihan vokasional menunjukkan hasil yang cukup baik.

¹⁹ Laksitaning Ratri Widowati, *Program Pelatihan Vokasional bagi Penyandang Difabilitas (Studi Kasus: Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) Cibinong)*, Skripsi, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Kelima, tesis karya Nasirin Aziz.²⁰ Penelitian Nasirin memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui waspada bencana secara dini, baik itu bencana yang bersifat ancaman sosial keamanan dan bencana alam. Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya menjaga situasi ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Latar belakang lembaga ini berdasarkan kondisi ancaman di Depok yang berjumlah 105 jenis ancaman, beberapa diantaranya adalah narkoba, kenakalan remaja, korupsi, konflik antar suku, kesenjangan di masyarakat dan lain-lain. Oleh sebab itu, adanya organisasi FKDM ini penting selain melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung, tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk peka, siaga dan antisipasi dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana. Metode yang dijalankan FKDM adalah pemberdayaan yang berpusat pada masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pentingnya kepekaan masyarakat secara dini terhadap lingkungan sekitarnya memiliki pengaruh yang besar. Semakin peka masyarakat terhadap lingkungannya, maka semakin mengetahui langkah apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut. Strategi yang dilakukan FKDM memiliki beberapa diantaranya adalah sosialisasi kewaspadaan dini melalui majelis ta'lim, ronda, kesenian dan sebagainya. Kegiatan utama FKDM Depok ini adalah

²⁰ Nasirin Aziz, *Pembersayaan Masyarakat Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Studi Kasus Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Depok)*, Tesis, Program Studi Sosiologi 2013, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.

memberikan pemahaman secara luas kepada masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan dini terhadap berbagai potensi ancaman baik dari alam maupun manusia.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara selama itu pasti memusatkan kesejahteraan pada masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan memiliki kewaspadaan dini dalam berbagai ancaman sosial keamanan dan bencana alam sehingga nantinya masyarakat tidak panik dalam mengatasi bencana atau ancaman tersebut. Pemberdayaan masyarakat melalui FKDM ini terlihat jelas melalui tugas pokok dari FKDM itu sendiri yaitu, menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.

Berdasarkan penelitian yang telah disampaikan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan kajian penulis baik dari subjek maupun objek penelitiannya. Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk mengkaji keberadaan Institut Kemandirian dalam posisinya sebagai agen pemberdayaan sosial masyarakat berbasis keterampilan kerja, dan bagaimana praktik proses pelatihan dalam bentuk upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran dilihat dengan kacamata sosiologi pendidikan.

Agar lebih memudahkan dalam memahami tinjauan penelitian sejenis yang ditinjau oleh penulis, berikut akan dipaparkan dalam bentuk tabel:

Tabel I.3
Tinjauan Pustaka Sejenis

No.	Peneliti	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dicky Djatnika Utama. 2009. <i>Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan</i> . Vol. 6, No. 1, Januari 2009:1-12. UNDIP: Jurnal Nasional.	Menjelaskan bagaimana pentingnya peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan diulas	Persamaan penelitian Dicky dengan penelitian penulis adalah sama-sama melihat jalan keluar dari masalah kemiskinan adalah dengan pendidikan	Perbedaan penelitian Dicky dengan penelitian penulis dapat dilihat dari permasalahan penelitiannya. Penelitian Dicky berdasarkan kondisi pendidikan dasar yang carut marut di Indonesia, sedangkan penulis mengangkat permasalahan penelitian dimulai dari bagaimana peran CSO dalam mengentaskan kemiskinan.
2.	Kironim Baroroh, <i>Peran Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Life Skill (Studi Kasus di Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta)</i> , Dimensia, Vol.3 No.1, 2015. Jurnal Nasional	Menjelaskan bentuk pemberdayaan yang dilakukan LSM dalam bentuk advokasi dan memaparkan faktor hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan program pemberdayaan	Persamaan penelitian Kironim dan penelitian penulis adalah sama-sama melihat bentuk pemberdayaan yang dilakukan LSM pada orang yang kurang mampu. Persamaan lainnya juga terdapat pada bentuk kegiatan yang dilakukan oleh LSM tersebut yaitu kegiatan non-formal berupa menjahit, dimana kegiatan ini menjadi salah satu program pemberdayaan di	Perbedaan penelitian Kironim dan penelitian penulis adalah dapat dilihat dari permasalahan penelitiannya. Penelitian Kironim berdasarkan kondisi termarginalisasikannya perempuan yang kurang mampu sedangkan penelitian peneliti bukan hanya perempuan saja, namun masyarakat miskin dan menganggur. Dalam penelitian Kironim memaparkan kegiatan

No.	Peneliti	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			lembaga yang penulis teliti.	pendidikan non-formal yaitu menjahit sedangkan dalam penelitian penulis memaparkan kegiatan pemberdayaan berupa program-program pelatihan keterampilan kerja
3	M. Rezaul Islam dan William J. Morgan 2011. <i>Non-governmental organizations in Bangladesh: their contribution to M. Rezaul Islam dan William J. Morgan.</i> Volume 47, Issue 3, 1 July 2012, Pages 369–385. Jurnal Internasional	Penelitian yang dilakukan di Bangladesh ini memfokuskan pada intervensi agar masyarakat dapat mengatasi keadaan sosial ekonomi yang memburuk dengan cara pengembangan kapital sosial dan pemberdayaan.	Persamaan penelitian Rezaul dan William dengan penelitian penulis adalah memfokuskan pada peran CSO sebagai agen penting dalam mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan	Perbedaan penelitian Rezaul dan William dengan penelitian penulis adalah jumlah objek penelitian yang diteliti oleh Rezaul dan William terdapat dua lembaga sedangkan penelitian peneliti hanya memfokuskan satu lembaga. Selain itu, perbedaan penelitian Rezaul dan William dengan penelitian peneliti terdapat pada cara pemberdayaan yang dilakukan LSM yang diteliti oleh Rezaul dan William menekankan pada modal sosial sedangkan penelitian peneliti cenderung pada pendidikan.
4.	Laksitaning Ratri Widowati, <i>Program Pelatihan Vokasional bagi Penyandang Difabilitas (Studi</i>	Memaparkan tentang pelaksanaan program pelatihan vokasional BBRVBD Cibinong.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek kajiannya yang hanya

No.	Peneliti	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<p><i>Kasus: Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) Cibinong</i>), Skripsi, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, 2017.</p>		<p>mengkaji terkait pemberdayaan dengan program pelatihan keterampilan sehingga tercipta pemberdayaan, khususnya pemberdayaan ekonomi.</p>	<p>memfokuskan pada penyandang difabilitas saja.</p>
5.	<p>Nasirin Aziz, <i>Pembersayaan Masyarakat Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Studi Kasus Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Depok)</i>, Tesis, Program Studi Sosiologi 2013, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.</p>	<p>Penelitian Nasirin memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui waspada bencana secara dini, baik itu bencana yang bersifat ancaman sosial keamanan dan bencana alam.</p>	<p>Persamaan penelitian Nasirin dengan penelitian peneliti adalah memfokuskan pada pemberdayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga khususnya untuk masyarakat daerah lokal.</p>	<p>Perbedaan penelitian Nasirin dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian Nasirin lembaga yang dijadikan sebagai objek penelitian merupakan bagian dari pihak pemerintah sedangkan dalam penelitian peneliti, lembaga yang dijadikan objek penelitian adalah lembaga swadaya masyarakat yang independen. Selain itu, perbedaan penelitian terdapat pada bentuk pemberdayaan. Dalam penelitian Nasirin bentuk pemberdayaannya adalah penyuluhan sedangkan dalam penelitian peneliti adalah bentuk program pelatihan</p>

No.	Peneliti	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				keterampilan kerja.

Sumber: Diolah dari Pustaka Sejenis

1.5 Kerangka Konsep

1.5.1 *Civil Society Organization (CSO)*

Mengutip Rahmat dalam Abdi Rahmat pengertian dari *Civil Society Organization (CSO)* adalah organisasi yang sederhana beroperasi di tingkat lokal (*community based organization*), meskipun ada pula dengan organisasi yang modern yang lebih kompleks dan pengelolaan yang lebih profesional serta mempunyai jaringan nasional.²¹ Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Larry Diamond dalam buku yang berjudul *Negara, Demokrasi dan Civil Society* karya Hadiwijoyo, mengatakan bahwa *civil society is the realm of organized social life that is voluntary, self-generating, self-supporting, autonomous from state, and bound by legal order or set of shared rules.*²² (Masyarakat sipil adalah ranah kehidupan sosial terorganisir yang bersifat sukarela, menghasilkan sendiri, mandiri, otonom dari negara, dan terikat oleh tatanan hukum atau seperangkat peraturan bersama). Kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa CSO merupakan organisasi yang bersifat sukarela, membangkitkan dan mendukung

²¹ Abdi Rahmat, Gerakan Sosial Dalam Aksi Penyelenggaraan Sekolah Untuk Anak Miskin, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 19 No. 1, 2014, hlm. 36

²² Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 67

seseorang, tidak tergantung pada negara serta terikat dalam peraturan bersama di dalamnya.

Pengelompokkan *civil society* dapat dilihat dari konfigurasi *civil society* yang meliputi; CSO I yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang memperjuangkan nilai-nilai yang disebut dengan istilah *Civil Society Value I* (CSV I), memiliki dimensi kultural dan bersifat horizontal. Sedangkan CSO II adalah kelompok-kelompok yang memperjuangkan nilai-nilai CSV II yaitu berbasis dimensi politik dan bersifat vertical.

Menurut David Korten yang dikutip dalam David Lewis yaitu CSO terbagi dalam empat generasi²³. Generasi pertama, generasi yang memiliki prioritas yang penting yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendadak atau pertolongan, seperti bencana alam. Generasi kedua adalah generasi yang melihat permasalahan sosial secara mendalam. Prioritas yang dilakukan adalah masyarakat lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Generasi ini memiliki pengaruh dari beberapa agenso, seperti donatur. Generasi ketiga adalah generasi yang memiliki fokus kepada kebijakan suatu negara melalui advokasi. Generasi keempat adalah generasi yang terhubung lebih luas dengan gerakan sosial dan mengkombinasikan tindakan aktivitas nasional maupun global dengan

²³ David Lewis dan Nazneen Kanji, 2009, *Non-Governmental Organization and Development*, (London: Taylor & Francis), hlm. 14-15

tujuan untuk menciptakan perubahan structural dalam jangka panjang. Untuk memahami keempat generasi tersebut, berikut adalah tabelnya²⁴:

Tabel I.4
Strategies of Development-Oriented NGOs: Four Generation

	Generation			
	First	Second	Third	Fourth
	Relief and Welfare	Community Development	Sustainable systems development	People's Movements
Problem definition	shortage	local inertia	institutional and policy constraints	inadequate mobilising vision
Time frame	immediate	project life	10 to 20 years	indefinite future
Scope	individual or family	neighbourhood or village	region or nation	national or global
Chief actors	NGO	NGO + community	all relevant public and private institutions	loosely defined networks of people and organisations
NGO Role	doer	mobilizer	catalyst	activist/ educator
Management orientation	logistics management	project management	strategic management	coalescing and energising self-managing networks
Development education	starving children	community self-help	constraining policies and institutions	spaceship earth

Sumber: *Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*, hlm. 117

1.5.2 Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam Bahasa Inggris, menurut Merriam Webster *Oxford English Dictionary*, mengandung dua pengertian: Pertama, *to give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan/kemampuan atau

²⁴ David C. Kortan, 1990, *Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*, (USA: Kumarian Press), hlm. 117

memungkinkan untuk. Kedua, *to give or authority to*, yang artinya memberi kekuasaan.²⁵

Onny S. Priyono dan Pranarka, sebagaimana yang dikutip oleh Roesmidi dan Riza Risyanti di dalam bukunya yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat*, berdasarkan penelitian kepustakaan tentang pengertian di atas, dinyatakan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. *Kedua*, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.²⁶

Payne dalam Adi mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna: “*to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients.*”²⁷ (Membantu klien memperoleh *power* untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dia lakukan terkait diri mereka, termasuk

²⁵ Drs. H. Roesmidi & Dra. Riza Risyanti, 2006, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alquaprint Jatinangor), hlm. 2

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Isbandi Rukminto Adi, 2003, *Pemberdayaan, Pembangunan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI), hlm. 54

mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan *power* yang ia miliki, serta melalui transfer *power* dari lingkungannya).

Menurut Hulme dan Turner dalam buku *Pemberdayaan Masyarakat* karya Roesmidi dan Riza Risyanti²⁸, pemberdayaan mendorong terjadinya suatu perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tak berdaya untuk memberi pengaruh yang lebih besar pada arena politik secara lokal dan nasional. Karenanya, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuatan/kekuasaan yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Di samping itu, pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal.

Tokoh lain, Jim Ife mengatakan pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dari mereka-yang-dirugikan (*the disadvantaged*).²⁹ Pernyataan ini mengandung dua konsep penting, keberdayaan dan yang-

²⁸ Drs. H. Roesmidi & Dra. Riza Risyanti, 2006, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alquaprint Jatinangor), hlm. 5

²⁹ Jim Ife, Frank Tesoriero, 2014, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, terj. Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 130

dirugikan. Bagaimanapun cara orang memandang pemberdayaan, tidak bisa tidak itu adalah tentang kekuasaan —individu atau kelompok memiliki atau menggunakan kesempatan untuk meraih kekuasaan ke dalam tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum ‘berpunya’ kepada kaum ‘tidak berpunya’ dan seterusnya.³⁰ Kekuasaan di sini bukan saja diartikan menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan atas.³¹

- a) Pilihan pribadi dan peluang hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan. Juga termasuk dalam kategori ini adalah pilihan-pilihan tentang tubuh kita sendiri, seksualitas, kesehatan dan seterusnya.
- b) Hak-hak dasar yang hendak dipertahankan, seperti kebebasan berbicara atau berkumpul.
- c) Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras aspirasi dan keinginannya.
- d) Idea atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 140-144

- e) Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
- f) Sumber daya: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- g) Aktifitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa.
- h) Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Pemberdayaan oleh Subejo dan Supriyanto dimaknai sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui kegiatan kolektif dan berjejaring sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. Pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah proses jangka pendek, namun merupakan proses jangka panjang.³²

Dwidjowijoto juga mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat mengandung dua pengertian, yaitu, pertama, memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Kedua, usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan merupakan proses yang

³² Ardhito Bhinadi, 2017, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 23

sifatnya menyeluruh, yaitu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³³

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Winarni³⁴ mengemukakan pemberdayaan adalah pengembangan, *enabling*, memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi tersebut berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Berangkat dari pengertian-pengertian di atas, jelaslah bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses untuk membantu, mendorong, memotivasi serta menyadarkan seseorang atau kelompok yang kurang atau tidak berdaya (misal: orang miskin dan atau cacat) agar memiliki kekuatan dan kesempatan

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 24

untuk menikmati dan mendapatkan segala haknya dan menentukan pilihan hidupnya sebagai manusia secara utuh.

1.5.3 Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)

Definisi *capacity building* memiliki variasi antar satu ahli dengan ahli lainnya. Hal ini dikarenakan *capacity building* merupakan kajian yang multi dimensi, dapat dilihat dari berbagai sisi, sehingga pendefinisian yang masih sulit didapat.³⁵ Secara umum konsep *capacity building* dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi. *Capacity building* dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga. *Capacity building* dapat pula dimaknai sebagai proses kreatif dalam membangun kapasitas yang belum nampak.

Milen mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus. Sedangkan Morgan merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan,

³⁵ Jenivia Dwi Ratnasari, Mochamad Makmur, Heru Ribawanto, Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang, *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1 No. 3, 2013, hlm. 105

perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/ sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.³⁶

UNDP (United Nations Development Program) dan CIDA (Canadian International Development Agency) dalam Milen memberikan pengertian peningkatan kapasitas sebagai proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk (a) menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*core functions*), memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan (b) memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan.³⁷

Pengertian mengenai karakteristik dari pengembangan kapasitas menurut Milen bahwa pengembangan kapasitas tentunya merupakan proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dari individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi satu kali. Ini merupakan proses internal yang hanya bisa difungsikan dan dipercepat dengan bantuan dari luar sebagai contoh penyumbang (donatur).³⁸ Menurut Grindle, pengembangan kapasitas (*capacity building*) merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan

³⁶ Anni Milen, 2004, *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan secara bebas*, (Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja), hlm. 12

³⁷ *Ibid.*, hlm. 15

³⁸ *Ibid.*, hlm. 16

efisiensi, efektivitas dan responsivitas kinerja suatu lembaga. Yakni efisiensi, dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcomes*; efektivitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan responsivitas merujuk kepada bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.³⁹

Pada beberapa literatur, konsep *capacity building* mengalami perdebatan dalam pendefinisianya.⁴⁰ Sebagian pakar mengatakan bahwa *capacity building* sebagai *capacity development* atau *capacity strengthening*, yang mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada. Sementara di lain pihak, banyak pula pakar yang merujuk *capacity building* pada *constructing capacity*, sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak. Walaupun begitu, kedua pendapat tersebut memiliki karakteristik diskusi yang sama.

Soeprapto merumuskan kata kunci definitif tentang apa itu *capacity building* (pengembangan kapasitas), yakni :⁴¹

1. Pengembangan kapasitas bukanlah produk, melainkan sebuah proses.
2. Pengembangan kapasitas adalah proses pembelajaran multi-tingkatan meliputi individu, grup, organisasi dan sistem.
3. Pengembangan kapasitas menghubungkan ide terhadap sikap.
4. Pengembangan kapasitas dapat disebut sebagai *actionable learning*, dimana pengembangan kapasitas meliputi sejumlah proses-proses

³⁹ Grindle, M.S., (editor), 1997, *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, (Boston, MA: Harvard Institute for International Development), hlm.

22

⁴⁰Soeprapto Riyadi, "Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju *Good Governance*", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Volume IV (1), FIA UNIBRAW, Malang, 2006, hlm. 11

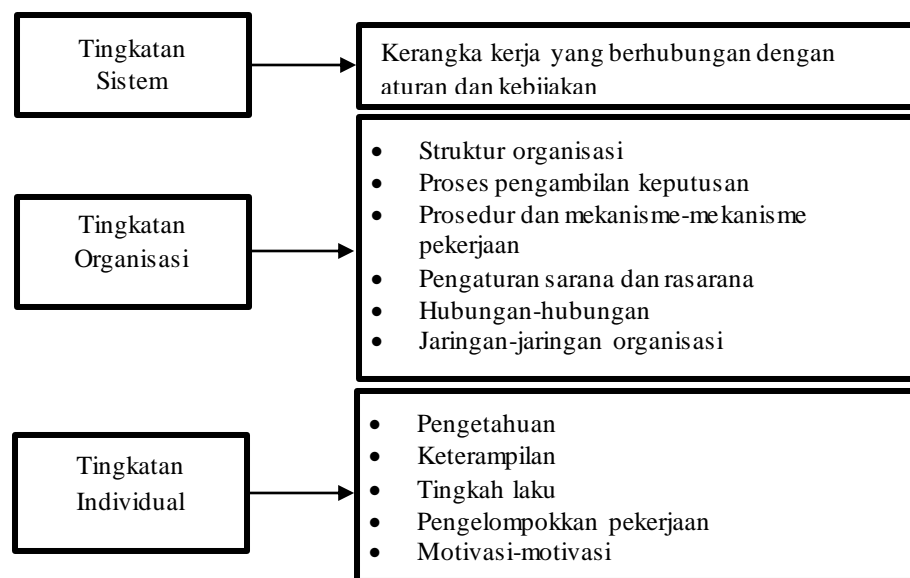
⁴¹ *Ibid.*

pembelajaran yang saling berkaitan, akumulasi benturan yang menambah prospek untuk individu dan organisasi agar secara terus menerus beradaptasi atas perubahan.

Berdasarkan pemaparan mengenai definisi *capacity building* menurut beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *capacity building* secara umum merupakan suatu proses pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi serta sistem untuk memperkuat kemampuan diri, kelompok dan organisasi sehingga mampu mempertahankan diri/profesinya ditengah perubahan yang terjadi secara terus menerus.

Menurut Soeprapto, upaya pengembangan kapasitas dilakukan dalam berbagai tingkatan, yaitu sebagaimana diilustrasikan melalui bagan berikut.⁴²

Skema I.1 Tingkatan Pengembangan Kapasitas



Sumber: Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju *Good Government*, hlm. 13

⁴² *Ibid.*, hlm. 13

Dalam Sosiologi, konsep pengembangan kapasitas ini penting untuk dikaitkan dengan tiga konsep lain, seperti agen, warga negara aktif, dan masyarakat sipil.⁴³ Sebagai warga negara yang aktif, seorang agen memiliki kapasitas untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pembangunan. Agen tidak lagi menjadi aktor yang pasif yang hanya menerima konsep pembangunan yang diusulkan negara. Namun, agen disini dapat mengusulkan dan membangun sendiri apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang diterapkan Sekolah Relawan untuk mengembangkan kapasitas melalui kualitas individu relawan.

1. Tingkatan Sistem

Bentuk tingkatan sistem seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan peraturan dan kebijakan-kebijakan. Pengembangan kapasitas di tingkatan ini dilakukan melalui pengembangan kebijakan dan peraturan, agar sistem yang ada dapat berjalan efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut.

2. Tingkat Organisasi

Wujud pengembangan organisasi seperti perubahan struktur organisasi, peningkatan proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, pengaturan sarana prasarana serta hubungan dan jaringan-jaringan organisasi. Secara umum, pengembangan kapasitas di tingkatan ini dapat dilakukan dengan pengembangan

⁴³ Rusfadia Saktiyanti Tjahja, 2015, *Metode Evaluasi Program Pembangunan*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta), hlm. 47

aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen serta pengembangan jaringan organisasi.

Milen mengemukakan bahwa salah satu penguatan organisasi yaitu memfokuskan proses dan struktur yang dapat memengaruhi bagaimana organisasi tersebut menetapkan tujuannya dalam menyusun pekerjaannya secara insentif. Struktur organisasi yang baik dan tepat dapat menjawab tantangan perubahan yang dihadapi oleh organisasi.⁴⁴

3. Tingkatan Individu

Dalam pengembangan kualitas individu, individu merupakan subjek yang menjadi target utama perubahan. Pengembangan kapasitas ini dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri manusia tersebut. Pengembangan individu mencakup peningkatan keterampilan, pengetahuan, tingkah laku, serta motivasi-motivasi individu. Secara umum, pengembangan kapasitas di tingkat ini dilakukan dengan cara pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai macam metode, baik dengan metode pendekatan pedagogi maupun andragogi. Selain itu, pengembangan kapasitas dalam tingkatan ini juga dapat dilakukan dengan cara nonformal seperti pendidikan dan pelatihan ataupun kursus-kursus.

Pengembangan kapasitas individu adalah segala upaya untuk memperbaiki atau mengembangkan mutu karakteristik pribadi atau kualitas

⁴⁴ Anni Milen, *Op.Cit.*, hlm. 18

individu agar lebih efektif dan efisien, baik di dalam entitasnya maupun dalam lingkup global.⁴⁵ Ada tiga jenis pengembangan kapasitas individu sebagai strategi untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan, yaitu:

Tabel I.5
Perbandingan Pengembangan Kapasitas Individu

Pengembangan Kapasitas Kepribadian	Pengembangan Kapasitas di Dunia Kerja	Pengembangan Kapasitas Keprofesionalan
Penampilan fisik (tingkah laku, tata busana, tata rias, gaya-bahasa), nilai-nilai perilaku (kebiasaan, norma dan etika pergaulan), dan keterampilan berkomunikasi yang meliputi gaya bicara, bahasa lisan maupun bahasa tubuh, penggunaan media yang disesuaikan dengan karakteristik penerima.	Merujuk pada karakteristik yang diperlukan bagi setiap individu agar “ <i>laku</i> ” sebelum memasuki dunia kerja, meningkatkan mutu dan produktifitasnya selama melakukan pekerjaan maupun untuk pengembangan karirnya, baik secara vertikal (di dalam organisasi) maupun secara horisontal (untuk berpindah ke organisasi).	Segala bentuk perilaku yang sangat diperlukan bagi pengembangan karir meliputi pengetahuan, teknis dan sikap kewirausahaan, dan keterampilan manajerial, sedang integritas profesional adalah suatu bentuk loyalitas terhadap profesi yang biasa terlihat dalam kebanggaan profesi dan pengembangan keahlian.

Sumber: Buku Pembangunan Berbasis Masyarakat, hlm. 133-135

Capacity building merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan, bukan berangkat dari pencapaian hasil semata, seperti yang telah dijelaskan dimuka bahwa *capacity building* adalah proses pembelajaran akan terus melakukan keberlanjutan untuk tetap dapat bertahan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi secara terus menerus. *Capacity building* bukan proses yang berangkat dari nol, melainkan berawal dari membangun potensi yang sudah

⁴⁵ Aprillia Theresia et al, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 134

ada untuk kemudian diproses agar lebih meningkat kualitas diri, kelompok, organisasi serta sistem agar tetap dapat beraturan di tengah lingkungan yang mengalami perubahan secara terus-menerus.

Walaupun konsep dasar dari *capacity building* ini adalah proses pembelajaran, namun *capacity building* pada penerapannya dapat diukur sesuai dengan tingkat pencapaiannya yang diinginkan, apakah diperuntukkan dalam jangka waktu yang pendek, menengah atau panjang. Proses *capacity building* dalam tingkatan yang terkecil merupakan proses yang berkaitan dengan pembelajaran dalam diri individu, kemudian pada tingkat kelompok, organisasi dan sistem dimana faktor-faktor tersebut juga difasilitasi oleh faktor eksternal yang merupakan lingkungan pembelajarannya.

1.5.4 Pelatihan sebagai Pengembangan Kapasitas

Pada pelatihan ini, pengembangan kapasitas yang dilakukan adalah pengembangan kapasitas di tingkat individu. Pengembangan kapasitas di tingkat individu dapat dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pendidikan formal dapat ditempuh melalui proses belajar, mulai dari bangku Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Sementara pendidikan non formal salah satunya dapat ditempuh melalui pelatihan.

Definisi mengenai pelatihan disampaikan oleh Oemar Hamalik yang menyatakan bahwa pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian

bantuan kepada peserta yang dilakukan oleh tenaga kerja profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dalam suatu organisasi atau perusahaan.⁴⁶

Menurut Sumantri, pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁷ Sedangkan Michael J. Jucius dalam Mustafa Kamil mengemukakan bahwa pelatihan adalah suatu proses untuk mengembangkan bakat dan keterampilan melalui pemberian materi pembelajaran praktik, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.⁴⁸ Sementara Komaruddin menganggap bahwa pelatihan sebagai investasi dalam sumber daya manusia, karena dalam melakukan pelatihan, kualitas sumber daya manusia akan meningkat.⁴⁹

Dengan beberapa pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pelatihan adalah proses pembelajaran yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat, yang dengan sengaja direncanakan secara sistematis dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pelatihan diatas tidak hanya sekedar *transfer of knowledge, transfer of value, transfer of skill*, tetapi

⁴⁶ Oemar Hamalik, 2000, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan: Pendekatan Terpadu*, (Yogyakarta: Bumi Aksara), hlm. 10

⁴⁷ S. Sumantri, 2000, *Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Fakultas Psikologi Unpad), hlm. 2

⁴⁸ Mustafa Kamil, 2010, *Model Pendidikan dan Pelatihan; Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 3

⁴⁹ Komaruddin Sastradipoera, 2006, *Pengembangan dan Pelatihan: Suatu pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Kappa-Sigma), hlm. 129

keseluruhan kegiatan yang terdapat di dalamnya. Sehingga output yang diharapkan adalah manusia tersebut dapat mengembangkan dirinya dan dapat memecahkan masalah dalam kehidupannya dengan ilmu yang dimiliki.

Secara umum, tujuan dari pelatihan adalah sebagai berikut:⁵⁰ Pertama, peningkatan keterampilan. Dengan dilakukannya kegiatan pelatihan, yang didalamnya terdapat proses pembelajaran, maka peserta pelatihan akan lebih berpengetahuan dan lebih trampil. Kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan keterampilan yang didapatkan selama proses pelatihan berlangsung, maka produktivitas peserta pun akan meningkat. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas akan sejalan dengan peningkatan keterampilan. Ketiga, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Dengan adanya lembaga-lembaga yang fokus dalam melakukan pelatihan, maka akan membantu memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang terlatih.

Agar dapat berhasil, program pelatihan perlu disusun dengan baik. penyusunan program pelatihan terdiri dari beberapa tahap, yaitu:⁵¹

- a. Rekrutmen peserta pelatihan. Dalam rekrutmen, biasanya penyelenggara memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan dan harus dipenuhi oleh peserta pelatihan.

⁵⁰ Ashar Sunyoto Munandar, 2001, *Psikologi Industri dan Organisasi*, (Jakarta: UI Press), hlm. 87

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 103

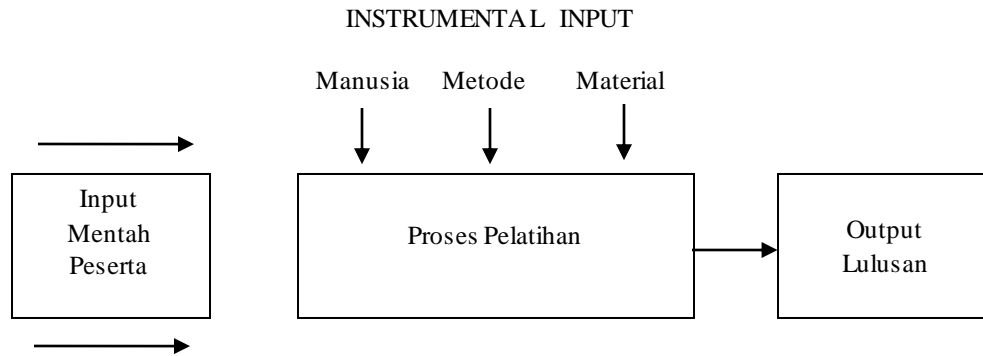
- b. Identifikasi kebutuhan peserta pelatihan. Identifikasi kebutuhan belajar maksudnya adalah menelusuri kebutuhan apa yang diperlukan oleh peserta pelatihan.
- c. Menentukan dan merumuskan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan yang dirumuskan akan menentukan penyelenggaraan pelatihan dari awal sampai akhir kegiatan. Mulai dari pembuatan rencana pembelajaran hingga evaluasi hasil belajar.
- d. Menyusun urutan kegiatan pelatihan. Pada tahap ini, penyelenggara pelatihan menentukan bahan belajar, memilih dan menentukan metode serta teknik pembelajaran, serta menentukan media yang akan digunakan. Dalam menyusun urutan kegiatan ini, faktor-faktor yang harus diperhatikan antara lain; peserta pelatihan, pelatih/instruktur, waktu pelatihan, fasilitas serta bahan yang dibutuhkan saat pelatihan, bentuk pelatihan, pelatihan untuk pelatih/instruktur. Pelatih atau instruktur juga harus mengikuti program pelatihan yang khusus diberikan untuk para instruktur, tujuannya adalah untuk mengupgrade para instruktur.
- e. Mengimplementasikan pelatihan. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan pelatihan, dimana pelatihan yang telah dirancang tersebut dilaksanakan.
- f. Evaluasi akhir. Tahap ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelatihan yang telah diberikan kepada peserta.
- g. Evaluasi program pelatihan. Evaluasi program pelatihan merupakan kegiatan untuk menilai seluruh kegiatan pelatihan dari awal sampai akhir

dan hasilnya menjadi masukan bagi pengembangan program pelatihan selanjutnya.

Pada pelatihan dengan sistem pendidikan dan pelatihan terpadu, terdapat beberapa komponen yang memengaruhi pelaksanaan pelatihan, yaitu tujuan pelatihan, peserta, program pelatihan, kurikulum latihan, metodologi pelatihan, praktik kerja lapangan, pelatih, pemantauan pelatihan, penilaian pelatihan, kepemimpinan, dan pasca pelatihan. Berdasarkan pendekatan sistem, komponen tersebut dikelompokkan menjadi komponen *input* yang terdiri dari raw input, input instrumental, komponen *proses* meliputi pelatihan di kampus (tempat pelatihan), dan pelatihan di lapangan dan pasca pelatihan, serta komponen *output*.⁵² Untuk memudahkan pembaca memahami komponen-komponen dalam pelatihan berdasarkan pendekatan sistem tersebut, maka penulis menyajikan skema berikut.

Skema I.2 Pelatihan sebagai Sistem

⁵² Oemar Hamalik, *Op.Cit.*, hlm. 18



Sumber: Analisis Penulis (2018)

Dalam suatu organisasi, pelatihan merupakan bagian dari proses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau sekelompok orang. Pelatihan merupakan upaya yang paling kongkret. Dengan pelatihan, diharapkan setiap orang dapat meningkatkan keterampilan dan keahliannya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang terampil ditambah dengan motivasi kerja yang tinggi sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerjanya.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam kegiatan ilmiah seperti penelitian. Pemilihan pemakaian metode atau cara kerja yang tepat dalam melakukan suatu kegiatan ilmiah dapat mempermudah dalam memperoleh data tentang obyek yang dikaji dan diteliti.

Agar tercapai tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini

bertujuan untuk memberikan gambaran nyata dan penjelasan dengan menganalisis secara deskriptif, sistematis dan faktual di lapangan mengenai praktik pemberdayaan yang dilakukan oleh Institut Kemandirian sebagai agen pemberdayaan sosial berbasis keterampilan kerja.

Penelitian kualitatif adalah proses memahami sesuai dengan tradisi penyelidikan metodologis yang berbeda yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun sebuah kompleksitas, gambar holistik, kalimat-kalimat analisa, melaporkan pandangan rinci dari informan, dan melakukan studi di *setting* natural.⁵³

1.6.1 Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian mengenai praktik pemberdayaan sosial di Institut Kemandirian (IK) yakni 3 (tiga) orang staff pengurus, 2 (dua) orang instruktur, 3 (tiga) orang peserta pelatihan, dan 3 (tiga) alumni IK. Pertama, staff pengurus dalam hal ini adalah pihak lembaga IK sebagai pihak yang memiliki sekaligus menyelenggarakan kegiatan program kursus gratis bagi orang-orang miskin, sekaligus sebagai informan kunci dalam penelitian ini. Kedua, para relawan yang terdaftar sebagai instruktur (pengajar) di IK. Ketiga, peserta pelatihan yang aktif mengikuti program kursus gratis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat peserta pelatihan tentang pelatihan yang mereka peroleh. Dalam hal ini, penelitian terhadap peserta pelatihan dilakukan sebagai informasi tambahan bagi penulis untuk lebih mendalami bagaimana pelaksanaan

⁵³ John W. Creswell, 1998, *Qualitative Inquiry And Research Design Choosing Among Five Tradition*. USA: Sage Publications, Inc. hlm. 15.

program kursus gratis yang dilaksanakan IK. Keempat, alumni IK yang telah lama bergabung dengan IK. Penelitian terhadap alumni dilakukan untuk melihat bagaimana efektivitas dari program pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan meneliti 4 (empat) kategori subjek di atas, diharapkan dapat mewakili data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tabel 1.6
Data Informan

No.	Informan	Tahun Bergabung	Posisi di IK
1	Pak Luqman	2013	Kepala Program Divisi Pendidikan dan Pelatihan
2	Pak Zainuddin	2009	Supervisor Program Reguler
3	Pak Purwadi	2013	Koordinator Pendampingan Alumni
4	Mba Leni	2017	Relawan (Instruktur Salon Muslimah)
5	Mba Novi	2016	Relawan (Instruktur Salon Muslimah)
6	Dhia Daulatul Jalilah	2018	Peserta pelatihan
7	Pipi Sartika	2018	Peserta pelatihan
8	Kurniasih	2018	Peserta Pelatihan
9	Mas Nanang	2017	Alumni
10	Bang Jekronius Lumbangaol	2017	Alumni
11	Pak Adi Mursyid	2015	Alumni

Sumber: Analisis Penulis (2018)

1.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Institut Kemandirian sebagai *setting* lokasi penelitian terletak di Jalan Zaitun Raya Blok B2 Komplek Perum Villa Ilhami/Islamic Village Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Sementara itu, pengurusan izin observasi dan observasi awal sudah dilakukan penulis sejak November 2017 hingga Maret 2018. Namun, penelitian secara intensif baru dimulai pada Januari 2017, mengingat Institut Kemandirian baru saja melakukan

proses perekrutan peserta pelatihan baru dan juga menyesuaikan dengan waktu yang dijanjikan untuk bertemu dengan informan.

1.6.3 Peran Peneliti

Pada penelitian ini, penulis berperan sebagai pengamat partisipan atau pengamat penuh. Kehadiran penulis juga diketahui oleh informan atau lembaga yang diteliti. Sehingga kehadiran penulis di lapangan untuk penelitian mutlak diperlukan.⁵⁴

Penelitian ini penulis mulai dengan mencari lembaga-lembaga yang *concern* dalam pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan. Setelah mencari dari berbagai sumber di internet, barulah penulis menemukan lembaga non-pemerintah bernama Institut Kemandirian yang diusung oleh Yayasan Dompot Dhuafa.

Letak Institut Kemandirian yang cukup strategis di perbatasan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang dan dekat dengan salah satu pusat perbelanjaan besar di Serpong ini memudahkan penulis untuk menemukan lokasinya. Kedatangan awal ke lokasi penelitian ini adalah untuk meminta izin penelitian terlebih dahulu. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, penulis melakukan pendekatan personal pada pihak lembaga guna memudahkan dalam mencari data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

⁵⁴ Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Jogjakarta: Teras), hlm. 167

Penulis sebagai orang luar, sudah dapat beradaptasi dengan baik karena Kepala Program Reguler atau biasa disebut *Supervisor* Program Reguler sebagai fokus utama program yang penulis kaji beserta Koordinator-koordinator Divisi, staff, fasilitator dan peserta pelatihan sangat terbuka menerima keberadaan penulis. Hal ini sangat membantu dan membuat penulis tidak canggung dalam mengumpulkan data. Bahan bacaan juga membantu penulis untuk menyusun *argument* dan pedoman observasi serta wawancara. Bahan bacaan juga membantu penulis dalam merangkai segi sosiologis serta pendidikan dari penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Gambaran umum mengenai Institut Kemandirian didapatkan dengan melakukan teknik observasi *situational analysis*. *Situational analysis* merupakan teknik observasi dimana penelitian terhadap suatu peristiwa dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci dalam peristiwa itu.⁵⁵ Tokoh kunci yang penulis observasi yang juga sebagai informan kunci adalah para *stakeholder* Institut Kemandirian dan juga para peserta pelatihan serta alumni Intitut Kemandirian.

Observational case studies merupakan teknik lain yang penulis gunakan guna mendapatkan data mengenai bagaimana program-program pelatihan di Institut Kemandirian berjalan dengan melihat langsung proses pelatihan dari tiap-tiap program. *Observational case studies* adalah metode penelitian yang terfokus

⁵⁵ Prasetya Irwan, 2007, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI), hlm. 54.

pada sekelompok orang (peserta didik, pekerja, dan lain-lain).⁵⁶ Teknik ini penulis fokuskan pada peserta pelatihan dan alumni dalam beberapa program pelatihan di Institut Kemandirian.

Teknik wawancara juga penulis gunakan untuk mendapatkan data primer mengenai proses praktik pelatihan di Institut Kemandirian. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan kunci dan informan baik dengan wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur.

1.6.5 Triangulasi Data

Triangulasi data adalah proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.⁵⁷ Data yang diperoleh dari salah satu informan tidak langsung dianalisa tetapi data tersebut dibandingkan dengan data atau informasi lain atau dengan sumber data lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari informasi secara sepihak karena tidak menutup kemungkinan data yang hanya diperoleh dari satu pihak tersebut bersifat subjektif. Penulis melakukan triangulasi data kepada beberapa peserta pelatihan dan beberapa alumni Institut Kemandirian yang telah memiliki wirausaha atau sudah bekerja mengenai sejauh mana manfaat yang mereka dapat dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Institut Kemandirian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa saja dan seberapa

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 54

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 76

efektif program yang dijalankan oleh Institut Kemandirian dalam rangka memberdayakan masyarakat agar menjadi masyarakat yang lebih mandiri.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab I atau Pendahuluan membicarakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep, serta metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, triangulasi data dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM INSTITUT KEMANDIRIAN (IK)

Bab ini akan mengulas sejarah berdirinya IK, profil IK secara umum, visi dan misi IK, jenis-jenis pelatihan IK, struktur organisasi, dan alur rekrutmen peserta pelatihan.

BAB III: PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL OLEH INSTITUT KEMANDIRIAN

Bab ini penulis akan membahas tentang pelaksanaan pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh Institut Kemandirian (IK). Pada bab ini akan dipaparkan bagaimana pelaksanaan program-program tersebut berjalan. Penjelasan tentang berjalannya program-program tersebut juga penulis coba kaitkan dengan unsur-unsur yang ada dalam konsep pemberdayaan yaitu menjadikan masyarakat mandiri, meningkatkan rasa

percaya diri, mendorong untuk memiliki keberdayaan, dan peningkatan kemampuan dari individu sebagai objek pemberdayaan.

Selain itu, dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai strategi pemberdayaan dan kontribusi IK dalam pengentasan kemiskinan. Selanjutnya akan dibahas juga mengenai faktor penghambat dan pendorong yang tidak terlepas dari terlaksananya suatu program pemberdayaan. Sehingga pada umumnya bab ini menjelaskan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak IK.

BAB IV: ANALISIS PRAKTIK PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KETERAMPILAN KERJA

Pada Bab ini akan disajikan analisis mengenai pemberdayaan sosial berbasis keterampilan kerja yang dilakukan oleh IK. Analisis ini dilakukan dengan memaparkan variabel yang terdapat dalam *Civil Society Organization* (CSO) dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IK. Secara spesifik, bab ini juga akan memaparkan peran IK sebagai *CSO Community Development*.

Bab ini juga memaparkan proses pelatihan yang dilakukan oleh IK sebagai pengembangan kapasitas dilihat dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja. Hal ini menjadi refleksi sosiologi pendidikan dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial IK.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab terakhir akan dikemukakan beberapa kesimpulan penulis terhadap hasil kajian sebelumnya, sebagai jawaban terhadap fokus penelitian atau rumusan masalah dan tujuan-tujuan penelitian yang dikemukakan pada bab pertama. Bab ini akan diakhiri dengan rekomendasi dari penulis yang ditujukan kepada pihak terkait, seperti pemerintah dan pengurus IK itu sendiri.